

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, dari pejabat eselon II ke atas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan memanjatkan Puji Syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida sang Hyang Widhi Wasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagai wujud dari pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017. Disamping itu laporan ini juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu program / kegiatan dengan menggunakan variabel atau indikator yang dapat di ukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien serta perkiraan manfaat dan dampak yang ditimbulkan.

Disadari walaupun di dalam penyusunan LAKIP ini telah diusahakan secara maksimal, namun masih banyak kekurangan ataupun kelemahannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Kami berharap walaupun tidak begitu sempurna mudah – mudahan laporan ini ada manfaatnya bagi pihak – pihak yang berkepentingan, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini, disampaikan terima kasih.

Gianyar, 31 Januari 2018

Plt. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,

I Wayan Sudamia, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19591231 198103 1 176

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI.....	7
E. RENCANA DAN SASARAN STRATEGIK 2013 -2018.....	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
B. REALISASI ANGGARAN	31

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN	35
B. REKOMENDASI.....	37

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya serta berorientasi pada hasil (*good governance and result oriented government*). Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, yang diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga terjadi perubahan nama SKPD dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penanaman modal serta perijinan dan non perijinan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar

ditempatkan Sumber Daya Manusia berupa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian. Adapun data Pegawai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

	Pendidikan	Jumlah
PNS	S2	9 orang
	S1	36 orang
	Diploma 3	-
	SMA	9 orang
	SMP	-
Harian	S1	2 orang
	SMA	3 orang

Dukungan sarana dan prasarana yang telah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Mobil	9 unit
2	Sepeda Motor	9 unit
3	Mesin Ketik Manual Portabbble (11-13)	2 unit
4	Lemari Besi	3 unit
5	Rak Kayu	1 buah
6	Filling Besi/Metal	9 unit
7	Brangkas	1 unit
8	Meja Kayu/Rotan	39 buah
9	Kursi Besi/Metal	1 buah
10	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	27 unit
11	Meja Rapat	1 unit
12	Meja Tulis	3 unit
13	Meja Telepon	1 unit
14	Meja Reseption	2 unit
15	Kursi Rapat	16 unit
16	Kursi Putar	5 unit

17	Meja Biro	1 unit
18	Sofa	2 set
19	Meubelair Lainnya	3 unit
20	AC Unit	6 unit
21	AC Split	7 unit
22	Camera Film	2 buah
23	Lambang Garuda Pancasila	1 buah
24	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1 buah
25	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1 set
26	Alat Pemadam Portable	1 set
27	P.C. Unit (Komputer Personal)	15 unit
28	Laptop	10 unit
29	Note Book	1 unit
30	Personal Komputer Lain-Lain	1 unit
31	Printer	6 unit
32	Scanner	1 unit
33	Server	1 unit
34	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 unit
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4 unit
36	Wireless Amplifier	1 unit

C. STRUKTUR ORGANISASI

C.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, bahwa tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal serta perijinan dan non perijinan kepada masyarakat.

C.2. Fungsi

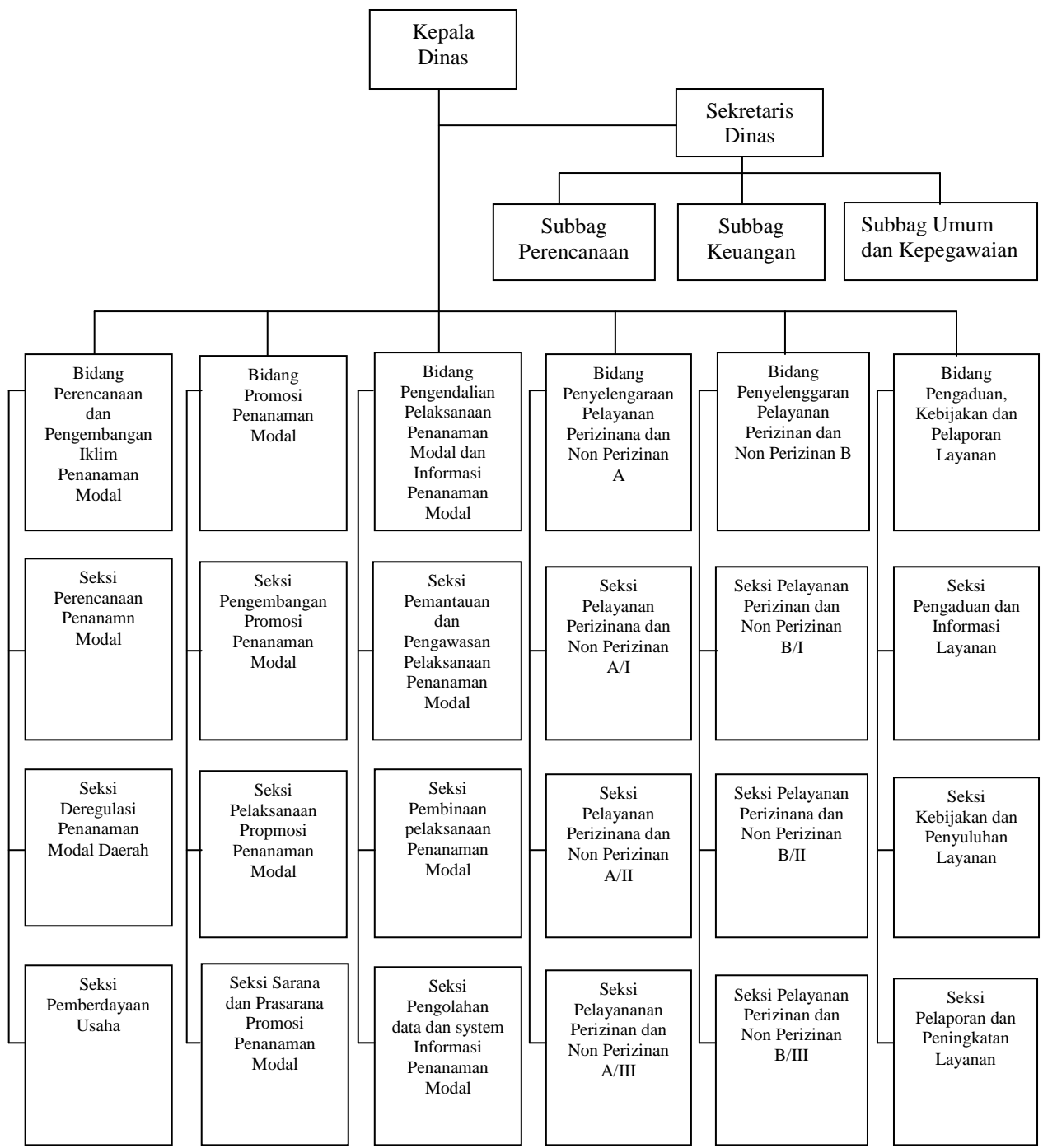
- a. Merumuskan kebijakan di Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pemberian Bintel dan Supervisi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- f. Pelaksanaan Administrasi Dinas.
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati

C.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Kasubag Perencanaan
 - b. Kasubag Umum & Kepegawaian
 - c. Kasubag Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Kasi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Kasi Deregulasi Penanaman Modal Daerah
 - c. Kasi Pemberdayaan Usaha
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - d. Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - e. Kasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

- f. Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahi :
 - a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I
 - b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II
 - c. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
 7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahi :
 - a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I
 - b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II
 - c. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
 8. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional



D. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas – tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, dipandang perlu untuk mengembangkan aspek – aspek strategik yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas. Adapun aspek –aspek strategik yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

i. Citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sejauh ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kemandirian Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2001 segala dana serta keuangan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gianyar masih melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Umum Setda Gianyar. Dan mulai tahun 2002 Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gianyar telah melaksanakan dana dan keuangan yang dikelola dan dipertanggung jawabkan sendiri oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gianyar saat itu sampai akhirnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai saat ini, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

iii. Sumber Daya Manusia.

Bergulirnya reformasi pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sejak awal Tahun 2001, maka wewenang daerah otonom untuk mengurus daerah yang amat besar, dan hal itu sangat mempengaruhi pola pemerintah daerah dituntut untuk lebih aspiratif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Namun pada saat yang bersamaan sumber daya Pemerintah Kabupaten khususnya DPMPTSP masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM, melalui diklat-diklat. Hal ini disebabkan juga karena semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dalam hal perijinan dan non perijinan.

iv. Sarana dan Prasarana.

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat kurang mendukung kinerja, terutama tempat penyimpanan arsip dan dokumen-dokumen bidang perijinan dan non perijinan. Untuk hal tersebut agar dapat disediakan sebagaimana mestinya, demi mewujudkan Pelayanan yang baik.

v. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

Isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan disesuaikan dengan harapan dan keinginan publik.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pelayanan Umum yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan memenuhi standar yang rasional yang menganut asas pelayanan lebih baik (better), lebih murah (cheaper), lebih cepat (faster) dan transparan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang legalitas usaha.

E. RENCANA DAN SASARAN STRATEGIK 2013 - 2018

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan.

Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar merupakan rencana lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang disusun sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

Adapun komponen – komponen dari Rencana Strategik tersebut adalah sebagai berikut :

1. VISI

Visi berkaitan dengan cara pandang jauh kedepan, kemana suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah wawasan dan cara pandang baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan.

Adapun Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar adalah

“Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Transparan dan Berkwalitas Menuju Pelayanan Prima“

Sebagai organisasi pelaksana tugas pemerintahan daerah dibidang pelayanan, DPMPTSP menetapkan **visi** tersebut setelah menyerap aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Dengan visi tersebut DPMPTSP dituntut untuk bisa tampil

didepan dan berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan suatu organisasi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian misi dapat dikatakan bahwa misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kebijakan atau strategi operasionalnya, sehingga tidak menyimpang dari visi yang telah disepakati.

Dalam pencapaian Visinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan 2 (dua) Misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya.

Adapun Misi tersebut adalah :

- 1. Mengembangkan Kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan potensi daerah**
- 2. Meningkatkan Transparansi dan Kualitas Pelayanan Prima di bidang Perizinan dan Non Perizinan**

Sasaran Startegis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dalam melaksanakan misinya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional.
2. Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Tercapainya Kepuasan Masyarakat
4. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tahun 2017 mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Tabel IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	POSISI AWAL (TAHUN 2013)	Target				
				Th 2014	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018
1	Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional	a. Jumlah investor PMDN dan PMA					150	170
		b. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah)					650.000.000.000	700.000.000.000
2.	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	a. Prosentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	85%	20% (3.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	40% (6.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	60% (9.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	80% (12.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	100% (15.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)
		b. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	77,71	77,8	78	78,5	79	80

3	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha	Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan	0%	0%	30%	60%	75%	100%
---	--	--	----	----	-----	-----	-----	------

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing)	Prosentase Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN	2%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan	- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 959.678.978	APBD II Perubahan (1 kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 409.479.890	APBD II Perubahan (3 kegiatan)
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 194.055.500	APBD II Perubahan (6 kegiatan)
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 103.277.000	APBD II Perubahan (5 kegiatan)
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 20.517.450	APBD II Perubahan (2 kegiatan)
6. Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik	Rp. 44.222.000	APBD II Perubahan

		(2 kegiatan)
7. Program Peningkatan Koordinasi Dengan Instansi/Dinas Teknis Terkait Dengan Masyarakat	Rp.356.650.500	APBD II Perubahan (2 kegiatan)

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

1. Program

Rencana program kegiatan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Adapun rencana program tahun 2017 adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi

c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan promosi di bidang investasi potensi unggulan daerah serta kerjasama di bidang investasi

d. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui kebijakan dan regulasi sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi

e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan maupun pengaduan dari masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat

f. Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan

g. Program Peningkatan Koordinasi dengan Instansi/Dinas Teknis Terkait Dengan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dalam melayani masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tahun 2017 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung/kantor

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- Koordinasi Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
 - Peningkatan Kegiatan Pemanataan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
 - Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
 - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :

 - Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan
 6. Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :

 - Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Non Perizinan
 - Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 7. Program Peningkatan Koordinasi dengan Instansi/Dinas/Teknis Terkait dengan Masyarakat
 - Pelayanan Perizinan
 - Pelayanan Perizinan B

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan dalam APBD Perubahan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Dibidang Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung Sumber Dana dari APBD sebesar Rp. 959.678.978,- (**Input**) jumlah dana tersebut digunakan untuk terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran dalam satu tahun seperti Honorarium, ATK, biaya telepon, biaya

perbaikan perlengkapan kantor, sesajen, SPPD dan lain-lain (**Output**) sehingga dapat terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (**Outcome**).

2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, pada DPA Induk 2017 dianggarkan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000, (Input) dengan target (Output) berupa 2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), tetapi saat APBD Perubahan terjadi rasionalisasi oleh TAPD Kabupaten Gianyar, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan dukungan dana sebesar Rp. 133.740.000,- (**Input**) jumlah dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama satu tahun dengan menyediakan peralatan gedung kantor seperti 4 bh mesin hitung, 2 bh almari arsip, 2 bh filling cabinet 4 laci, 3 unit AC Split, 2 bh laptop, 1 bh printer, 20 bh meja kerja dan 20 kursi kerja (**Output**) sehingga dapat terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan yang optimal (**outcome**)
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, dengan dukungan dana sebesar Rp. 226.239.890,- (**Input**) yang dapat digunakan agar terpelihara 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4 dan 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 2 (**Output**) sehingga dapat terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan yang optimal (**outcome**)
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan dukungan dana sebesar Rp. 49.500.000,- (**Input**) yang dapat digunakan agar terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor seperti pemeliharaan system Informasi perizinan melalui jasa tenaga maintenance, pemeliharaan mesin Tik, AC, computer, laptop dan printer dalam satu tahun untuk melaksanakan kegiatan perijinan, Non perijinan, pengaduan dan kegiatan rutinitas (**Output**) sehingga dapat terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan yang optimal (**outcome**).
6. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, menempatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 24.495.000,- (**Input**) yang

digunakan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah Kabupaten Gianyar (**Output**) sehingga berkembangnya investasi unggulan daerah (**outcome**)

7. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 14.280.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi terkait penanaman modal antar instansi terkait dengan masyarakat pengusaha (**Output**) sehingga terwujudnya koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal (**outcome**).
8. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 24.130.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama terkait penanaman modal antar instansi terkait dengan masyarakat pengusaha (**Output**) sehingga terwujudnya kesepakatan bersama dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Gianyar (**outcome**).
9. Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 30.500.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar (**Output**) sehingga terwujudnya Legalitas Investasi di Kabupaten Gianyar (**outcome**).
10. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pada APBD induk 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- , tetapi pada anggaran perubahan dirasionalisasi oleh TAPD sehingga anggarannya menjadi Rp. 2.820.500,-, yang digunakan untuk survey potensi investasi di kabupaten Gianyar.
11. Kegiatan Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 97.830.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan Pameran Promosi

Peluang dan Potensi Investasi (**Output**) sehingga tersebarnya informasi peluang dan potensi Investasi di Kabupaten Gianyar (**outcome**).

12. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 20.922.000,- (**Input**) yang digunakan untuk mengadakan SOP dan Peraturan Perundangan yang mengatur pelaksanaan Penanaman Modal (**Output**) sehingga terwujudnya Investasi yang sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku (**outcome**).
13. Kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi Kerjasama di bidang Investasi, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 11.805.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama investasi (**Output**) sehingga terwujudnya kesepakatan kerjasama investasi (**outcome**).
14. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah, mendapatkan anggaran dari APBD Induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 55.000.000,- (**Input**), tetapi saat Perubahan dirasionalisasi sebesar Rp. 5.000.000 sehingga menjadi Rp. 50.000.0000 yang digunakan untuk menyediakan sistem informasi Penanaman Modal di Kabupaten Gianyar (**Output**) sehingga terwujudnya Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Gianyar (**outcome**).
15. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 20.500.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan monitoring Penanaman Modal di Kabupaten Gianyar (**Output**) sehingga tersedianya Data Investasi yang berizin di Kabupaten Gianyar (**outcome**).
16. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pada DPA Induk 2017 dianggarkan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Input), tetapi saat APBD Perubahan terjadi rasionalisasi oleh TAPD Kabupaten Gianyar, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

17. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 3.150.000,- (**Input**) yang digunakan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebanyak 2 kali periode survey dengan jumlah responden pada satu periode survey sebanyak 150 orang (**Output**), sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79 (**outcome**).
18. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan, mendapatkan anggaran dari APBD induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 46.877.450,- (**Input**) tetapi saat APBD Perubahan dirasionalisasi oleh TAPD menjadi Rp. 17.367.450,- untuk menangani pengaduan terkait perizinan yang masuk dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis (**output**) sehingga seluruh pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik (**outcome**).
19. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Non Perizinan, mendapatkan anggaran dari APBD induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 38.500.000,- (**Input**) tetapi saat APBD Perubahan dirasionalisasi oleh TAPD menjadi Rp. 22.627.000,- untuk mengecek kesesuaian atas kepemilikan izin usaha dari masyarakat (**output**) sehingga diperoleh data kesesuaian atas kepemilikan izin usaha dari masyarakat (**outcome**).
20. Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, mendapatkan anggaran dari APBD Induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 25.000.000,- (**Input**) tetapi saat APBD Perubahan dirasionalisasi oleh TAPD menjadi Rp. 21.595.000,-, dana tersebut untuk melaksanakan sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan (**output**) sehingga pengetahuan masyarakat tentang proses pelayanan perizinan dan penanaman modal meningkat (**outcome**).
21. Kegiatan Pelayanan Perizinan, mendapatkan anggaran dari APBD Induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 350.032.500,- (**Input**) tetapi saat APBD Perubahan dirasionalisasi oleh TAPD menjadi Rp. 260.590.500,- dan dana tersebut untuk melaksanakan melaksanakan pelayanan perizinan dan non

perizinan A (**output**) sehingga terwujudnya koordinasi dengan instansi/ Dinas teknis terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan (**outcome**).

22. Kegiatan Pelayanan Perizinan B, mendapatkan anggaran dari APBD Induk Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 144.540.000,- (**Input**) tetapi saat APBD Perubahan dirasionalisasi oleh TAPD menjadi Rp. 96.060.000,- dan dana tersebut untuk melaksanakan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan B (**output**) sehingga terwujudnya koordinasi dengan instansi/ Dinas teknis terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan (**outcome**).

3. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Perkantoran dalam satu tahun
2. Tersedianya Peralatan Kantor
3. Terpeliharanya 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4 dan 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun
4. Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam satu tahun
5. Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah
6. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat pengusaha
7. Terlaksananya kerjasama investasi
8. Frekwensi pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
9. Frekuensi survey potensi investasi yg dilakukan
10. Terlaksananya pameran promosi peluang dan potensi investasi
11. Tersedianya SOP dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan penanaman modal
12. Terlaksananya kegiatan fasilitas dan koordinasi kerjasama investasi
13. Tersedianya sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar
14. Frekwensi monitoring potensi investasi yang dilakukan
15. Frekuensi Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan
16. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dan tepat waktu.
17. Frekuensi Monitoring yang dilakukan

18. Terlaksananya Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
19. Jumlah izin terbit dari jumlah permohonan (Perizinan A)
20. Jumlah izin terbit dari jumlah permohonan (Perizinan B)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dapat diketahui melalui pengukuran kinerja yang dilakukan atas kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran Kinerja Kegiatan dituangkan di dalam :

1. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Kenaikan
				2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing)	Prosentase Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN	2%	642.310.402.161	1.128.242.158.583	75,65% (sudah melampaui target)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan	-IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79	81,27	80,25	Sudah melampaui target

2. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Meningkatkan investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing)	a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran dalam satu tahun	a. 1 paket	a. 1 paket	100%

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Penanaman Modal serta Perizinana dan Non Perizinan	b. Tersedianya Peralatan Kantor	b. 1 paket (4 bh mesin hitung, 2 bh almari arsip, 2 bh filling cabinet, 3 unit AC Split, 2 bh Laptop, 1 bh printer, 20 bh meja kerja & 20 bhkursi kerja	b. 1 paket (4 bh mesin hitung, 2 bh almari arsip, 2 bh filling cabinet, 3 unit AC Split, 2 bh Laptop, 1 bh printer, 20 bh meja kerja & 20 bhkursi kerja	100%
	c. Terpeliharanya 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4 dan 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun	c. 1 paket (BBM, jasa service, penggantian suku cadang dan STNK)	c. 1 paket (BBM, jasa service, penggantian suku cadang dan STNK)	100%
	d. Terpeliharanya peralatan gedung kantor.	d.1 paket (peme-liharaan sistem infor-masi perizin-an, mesin ketik, AC, Komputer, Laptop, Printer)	d. 1 paket (peme-liharaan sistem infor-masi perizin-an, mesin ketik, AC, Komputer, Laptop, Printer)	100%
	e. Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah	e.1 paket	e. 1 paket	100%
	f. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat pengusaha	f. 1 paket	f. 1 paket	100%
	g. Terlaksananya kerjasama investasi	g.1 paket	g. 1 paket	100%

	h. Frekwensi pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	h. 1 paket	h. 1 paket	100%
	i. Frekuensi survey potensi investasi yang dilakukan	i. 1 paket	i. 1 paket	100%
	j. Terlaksananya pameran promosi peluang dan potensi investasi	j. 1 paket	j. 1 paket	100%
	k. Tersedianya SOP dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan penanaman modal	k. 1 paket	k. 1 paket	100%
	l. Terlaksananya kegiatan fasilitas dan koordinasi kerjasama investasi	l. 1 Paket	l. 1 paket	100%
	m. Tersedianya sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar	m. 1 paket	m. 1 paket	100%
	n. Frekwensi monitoring potensi investasi yang dilakukan	n. 1 paket	n. 1 paket	100%

	o. Frekuensi Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	o. 2 kali (300 responden)	o. 2 kali (300 responden)	100%
	p. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dan tepat waktu.	p. 12 kali.	p. 27 kali/laporan pengaduan	225%
	q. Frekuensi Monitoring yang dilakukan	q. 144 kali (324 ijin)	q. 71 kali (238 ijin)	49,30% (73,45%)
	r. Terlaksananya Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	r. 23 desa (di 7 kecamatan)	r. 25 desa (di 7 kecamatan)	108,69%
	s. Jumlah ijin terbit dari jumlah permohonan (Perizinan A)	s. 1.500	s. 1.454 ijin terbit dari 1.728 permohonan	84,14%
	t. Jumlah ijin terbit dari jumlah permohonan (Perizinan B)	t. 1.500	t. 2.974 ijin terbit dari 2.740 permohonan	108,54%

Berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan terhadap kinerja kegiatan dan sasaran, diperoleh gambaran sebagai berikut :

3. Kinerja Kegiatan 2017

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA (%)		
		INPUT	OUTPUT	OUTCOME
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan /Perkantoran	100	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	100%	100%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100%	100%	100%
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	100%	100%	100%
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	100%	100%	100%
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan	100%	100%	100%

	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	100%
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan Informasi Investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah	100%	100%	100%
11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui kegiatan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	100%	100%	100%
12	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui kegiatan Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	100%	100%	100%
13	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	100%	100%	100%
14	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	100%
15	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
16	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Penanganan Pengaduan	100%	100%	225%

	Masyarakat Terkait Perizinan			
17	Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik melalui kegiatan Monitoring dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan	100%	100%	49,30% (73,45%)
18	Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik melalui kegiatan Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan	100%	100%	108,69%
19	Program Peningkatan koordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dengan masyarakat melalui kegiatan Pelayanan perizinan <ul style="list-style-type: none"> • Ijin Lokasi • Ijin Prinsip • IMB • SITU/HO • ITPMB • Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu 	100%	100%	84,14%
20	Program Peningkatan koordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dengan masyarakat melalui kegiatan Pelayanan perizinan B <ul style="list-style-type: none"> • Ijin Op. Pariwisata • SIUP • SIUP – MB • IUI • TDP • Ijin Timbun BBM • Ijin Reklame • Ijin Op. Kesehatan • Ijin Op. Pendidikan • Ijin Op. Pertanian • Ijin Op. Peternakan • Tanda Daftar Gudang 	100%	100%	108,54%

4. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya.

Dapat dilihat pada tabel terlampir

5. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMPTSP .

Dapat dilihat pada tabel terlampir

6. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan Standar Nasional/ IKU

No	Sasaran	Indikator	Target Dalam IKU Th 2017	Realisasi Th 2017
1.	Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional	a. Jumlah investor PMDN dan PMA	150	330
		b. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah)	650.000.000.000	1.128.242.158.583
2.	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Prosentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	80% (12.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	91,93% (20.208 ijin terbit dari 21.981 permohonan)
3	Tercapainya Kepuasan Masyarakat	a. Persentase Pengaduan ditindaklanjuti dan tepat waktu	80%(48 kali dari 60 kali)	108,33% (65 pengaduan yang masuk dari 2014 sampai dengan 2017 dan seluruhnya sudah ditangani
		b. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	79	80,25 (rata-rata nilaiIKM semester I & II tahun 2017)
4	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha	Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan	75% (53 desa dari 70 desa)	82,85% (58 desa dari 70 desa)

7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

a) Permasalahan

- Beberapa kegiatan tidak memenuhi target baik realisasi kinerja maupun anggaran disebabkan karena pengisian pejabat eselon IV yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan baru terisi pada pertengahan tahun 2017, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan secara optimal.
- Belum optimalnya sarana prasarana, seperti dalam hal tempat penyimpanan arsip-arsip pemohon, termasuk pemanfaatan teknologi, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.
- Kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.
- Belum optimalnya sinkronisasi peraturan mengenai perijinan antar Kementerian, seperti antara Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3023/SJ tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan di Daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Salah satu persyaratan dari perizinan untuk izin usaha operasional yaitu laik sehat belum bisa dipenuhi dengan cepat karena laik sehat memerlukan waktu penyelesaian paling cepat selama 2 bulan.
- Adanya ketidaksinkronan antara satu izin dengan izin berikutnya, karena keterbatasan pengetahuan dari pemohon.
- Kepengurusan perizinan terkadang dilakukan oleh Pihak ke-III.

b) Solusi

- Pengisian jabatan eselon IV yang kosong agar dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara optimal.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana yang ada dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik secara bertahap.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan

koordinasi antar aparatur dan antar instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengurus perizinannya sendiri dan tidak menggunakan pihak III.

- Menyiapkan regulasi dan/atau harmonisasi peraturan terkait pelayanan publik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Antara Petugas Front Office dengan pemohon harus benar-benar komunikatif dan memberikan pengertian terhadap jenis izin yang akan digunakan untuk jenis usahanya.

8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017 tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya.

9. Analisis Program

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tahun 2017 dibiayai dengan sumber dana sebagai berikut :

No	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Belanja tidak langsung kegiatan			
1.	Belanja Pegawai	6.519.833.171,00	5.310.674.887,00	81,45
	Jumlah I	6.519.833.171,00	5.310.674.887,00	81,45
II.	Belanja langsung			
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran	959.678.978,-	840.925.269,-	87,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	226.239.890,-	222.851.188,-	98,50
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	133.740.000,-	127.628.680,-	95,43
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49.500.000,-	40.465.000,-	81,75

5	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	24.495.000,-	23.806.500,-	97,19
6	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	14.280.000,-	14.279.300,-	100
7	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	24.130.000,-	18.526.250,-	76,78
8	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	30.500.000,-	24.718.380,-	81,04
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.820.500,-	2.820.000,-	100
10	Informasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	97.830.000,-	96.514.500,-	98,66
11	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	20.922.000,-	19.270.000,-	92,10
12	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	11.805.000,-	7.530.000,-	63,79
13	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	50.000.000,-	49.950.000,-	99,90
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.500.000,-	14.524.500,-	70,85
15	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	3.150.000,-	2.370.000,-	75,24
16	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan	17.367.450,-	13.033.450,-	75,05
17	Monitoring dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan	22.627.000,-	18.733.500,-	82,79
18	Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan	21.595.000,-	21.595.000	100
19	Pelayanan Perizinan	260.590.500,-	260.590.500,-	100
20	Pelayanan Perizinan B	96.060.000,-	95.685.000,-	99,61
	Jumlah II	2.087.831.318,-	1.915.817.517,-	91,76
	JUMLAH I + II	8.607.664.489,-,-	7.226.492.404,-	83,95

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana untuk kegiatan belanja langsung merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan-kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 75% ada 2 kegiatan yaitu :
 - a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, hal ini disebabkan karena pada Belanja SPPD Dalam Daerah masih terdapat sisa anggaran. Hal ini disebabkan karena pengisian pejabat Eselon IV baru terisi di Triwulan III sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, hal ini disebabkan karena pada Belanja SPPD Dalam Daerah dan BBM/Gas dan Pemulas masih terdapat sisa anggaran. Hal ini disebabkan karena pengisian pejabat Eselon IV baru terisi di Triwulan III sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Dana tidak langsung kegiatan adalah dana penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk dapat berlangsungnya kegiatan operasional kantor sehari-hari, seperti gaji pegawai . Terlihat jelas bahwa dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. **6.519.833.171,00** sedangkan yang terealisasi penggunaannya adalah sebesar Rp. **5.310.674.887,00** (realisasi sebesar **81,45%**) dan sisanya masih di Kas Daerah. Sedangkan untuk dana belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. **2.087.831.318,00** dan yang terealisasi sebesar Rp. **1.915.817.517,00** (realisasi sebesar **91,76%**).

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar pada tahun 2017 telah melaksanakan 20 (Dua Puluh) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran termasuk didalamnya yaitu gaji pegawai honorer, Honorarium Pertugas Khusus, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, ATK, SPPD, dan lain-lain.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan melaksanakan pengadaan Mesin Hitung, Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, AC, Laptop, Printer, Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja Pejabat.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas baik roda 4 maupun roda 2 juga dilakukan setiap bulan sekali, agar kondisinya tetap terjaga.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor berupa Mesin Tik, AC, Komputer dan Laptop dan sistem pelayanan perizinan.
5. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah yang dilaksanakan untuk mengembangkan potensi-potensi investasi di kabupaten Gianyar.
6. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal yang dilaksanakan untuk koordinasi dengan masyarakat pengusaha dalam mengembangkan investasi di Kabupaten Gianyar.
7. Peningkatan Kordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengembangkan investasi di kabupaten Gianyar.

8. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal agar dapat berkembang dengan baik.
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Informasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan kegiatan pameran investasi, dimana dalam tahun 2017 mengikuti 2 even pameran yaitu pameran di Surabaya pada bulan Mei 2017 dan Trade Expo Jakarta pada bulan Oktober 2017.
11. Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur merupakan kegiatan penyusunan SOP Penanaman Modal dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal.
12. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi merupakan kegiatan koordinasi dengan OPD terkait dengan penanaman modal.
13. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah merupakan kegiatan penyusunan sistem informasi penanaman modal sehingga dapat diperoleh data dan informasi penanaman modal.
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal.
15. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan yang mensurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP kabupaten Gianyar dengan membagikan questioner kepada setiap pemohon. Adapun target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dikonversi tahun 2017 adalah 79 sedangkan realisasinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017 (rata-rata nilai semester I dan II) adalah 80,25, sehingga mutu pelayanan bernilai A dan kinerja unit pelayanan dikategorikan **Sangat Baik**.

16. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan merupakan kegiatan Penanganan Pengaduan dari masyarakat baik yang tertulis, melalui telepon maupun datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Gianyar untuk mengadu. Pada tahun 2017 telah ditargetkan 12 kali penanganan pengaduan dan realisasinya ada 27 pengaduan masyarakat yang masuk dan seluruhnya sudah ditangani. Kegiatan Penanganan Pengaduan sangat membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mengadu serta dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mampu memahami hukum dan tertib administrasi serta pentingnya legalitas usaha.
17. Monitoring dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan merupakan kegiatan monitoring dan mengevaluasi kesesuaian izin dengan kepemilikan usaha.
18. Sosialisasi Penanaman modal dan pelayanan perizinan merupakan kegiatan mensosialisasikan mengenai pelayanan perizinan dan penanaman modal.
19. Pelayanan Perizinan merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk izin Lokasi, Prinsip, IMB, SITU/HO, ITPMB dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu.
20. Pelayanan Perizinan B merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk izin Operasional Pariwisata, SIUP, SIUP-MB, IUI, TDP, Izin Timbun BBM, Izin Reklame, Izin Operasional Kesehatan, Izin Operasional Pendidikan, Izin Operasional Pertanian, Izin Operasional Peternakan dan Tanda Daftar Gudang.
21. Dari dua puluh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, tidak terdapat masalah yang berarti. Sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung yang didukung oleh dana dari APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp. **2.087.831.318,-** dan terealisasi dalam pelaksanaannya sebesar Rp. **1.915.817.517,-**. Ini berarti penyerapan dana APBD kabupaten Gianyar tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gianyar sebesar 91,76% dengan pemanfaatan dana yang efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 yaitu :

1. Perlu ditingkatkan pemahaman petugas pelayanan perizinan di bidang etika pelayanan maupun di bidang komputerisasi, mengingat pada tahun anggaran 2018 sudah terpasang sistem informasi penanaman modal dan perizinan, sistem komputerisasi Perizinan SIUP dan sistem komputerisasi data wajib pajak reklame.
2. Agar diusulkan pembuatan gedung untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih representatif sehingga masyarakat pemohon lebih nyaman dalam mengurus perizinannya.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

I WAYAN SUDAMIA.SH.MH.

Pembina Utama Muda
Nip. 19591231 198103 1 176

**LAMPIRAN LAKIP
DPMPTSP
KAB. GIANYAR
T.A. 2017**

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Gianyar

Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja outcome	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional	c. Jumlah investor PMDN dan PMA	150	330	220%
		c. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah)	650.000.000.000	1.128.242.158.583	173,57%
2.	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Prosentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	80% (12.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	91,93% (20.208 ijin terbit dari 21.981 permohonan)	91,93%
3	Tercapainya Kepuasan Masyarakat	c. Persentase Pengaduan ditindak lanjutikan tepat waktu	80%(48 kali dari 60 kali)	108,33% (65 pengaduan yang masuk dari 2014 sampai dengan 2017 dan seluruhnya sudah ditangani)	108,33%
		d. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	79	80,25 (rata-rata nilai IKM semester I & II tahun 2017)	80,25
4	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha	Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan	75% (53 desa dari 70 desa)	82,85% (58 desa dari 70 desa)	82,85%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 2.087.831.318,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 1.915.817.517,- (91,76%)

Gianyar, 31 JANUARI 2018
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

I WAYAN SUDAMIA, SH, MH.
Pembina Utama Muda
Nip. 19591231 198103 1 176

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya.

TABEL PERBANDINGAN KINERJA DPMPTSP TH. 2016 DENGAN 2017

No.	Uraian /Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017			% Peningkatan/ Penurunan
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan /Perkantoran	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Pelayanan Perijinan • Prosentase Ijin yang diterbitkan	4.546	4.304	94,68	Tahun 2017 kegiatan Pelayanan Perizinan merupakan kegiatan dalam Program peningkatan kordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dengan masyarakat dan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan (A) dan Pelayanan Perizinan B			
	Dari Segi Investasi PMA : • Jumlah • Jml. Tenaga Kerja • Jumlah Modal	Tidak boleh ditarget sesuai arahan dari pusat	12 342 \$ 28.150.000 Rp 70.450.000.000		Tidak boleh ditarget sesuai arahan dari pusat	23 524 \$ 31.630.000 Rp 145.895.000.000		91,66 53 12,36 107,09
	Dari Segi Investasi PMDN : • Jumlah • Jml. Tenaga Kerja • Jumlah Modal	Tidak boleh ditarget sesuai arahan dari pusat	131 853 Rp 571.860.402.161		Tidak boleh ditarget sesuai arahan dari pusat	307 2.851 Rp 982.347.158.583		134,35 234,23

No.	Uraian /Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	% Peningkatan-
-----	------------------	------------	------------	----------------

		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	an/ Penurun-an
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	-
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10 orang	10 orang	100	Sudah tidak dilaksanakan lagi karena merupakan ranah kegiatan BKPSDM			
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp.15.050.000.000	Rp.17.320.528.649	115,09	Kegiatannya digabung dalam pelayanan perizinan B			

No.	Uraian /Kegiatan	Tahun 2016			Tahun 2017			% Peningkatan/ Penurunan
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui Pengembangan potensi unggulan daerah	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Kordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
12	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
13	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Informasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
14	Program Peningkatan Iklim	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100

	Investasi dan Realisasi Investasi melalui Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur							
15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
17	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	1 paket	1 paket	100	100
18	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui dialog interaktif/ Penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan	12	9	100 (karena jumlah pengaduan yang masuk 9 pengaduan)	12 kali/laporan pengaduan	27 kali/laporan pengaduan	225	125
19	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	81,27	103,5	79	80,25 (rata-rata nilai IKM semester I & II tahun 2017)	101,58	(1,02)
20	Program Peningkatan	144 kali	119 kali (413	82,64%	144 kali	71 kali (238 ijin)	49,30%	(33,34) /

	Optimalisasi Pelayanan Publik melalui kegiatan Monitoring dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan	(288 ijin)	ijin)	(143,4%)	(324 ijin)		(73,45%)	(69,95)
21	Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik melalui kegiatan Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan	60%	47,14% (33 desa dari 70 desa)	47,14%	75% (53 desa dari 70 desa)	82,85% (58 desa dari 70 desa)	82,85%	35,71
22	Program peningkatan kordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dengan masyarakat melalui pelayanan perizinan	-	-	-	1.500 ijin terbit dari 1500 permohonan	1.454 ijin terbit dari 1.728 permohonan	84,14%	84,14%
23	Program peningkatan kordinasi dengan instansi/dinas teknis terkait dengan masyarakat melalui pelayanan perizinan B	-	-	-	1.500 ijin terbit dari 1500 permohonan	2.974 ijin terbit dari 2.739 permohonan	108,58%	108,58%

Gianyar, 31 Januari 2018
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,

I Wayan Sudamia, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198103 1 176

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2017**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUGAS POKOK : PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

No	Sasaran Strategis	OUTCOME				Program/ Kegiatan	OUTPUT				ANGGARAN		
		Indikator	Targ et	Realisa si	%		Indikator	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tercapainya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase Permohonan masuk yang ditindaklan- juti tepat waktu	100 %	147,13 % (rata-rata realisa si pelaya nan peri- zinan A & B)	97,55	Program Peningkatan Koordinasi dengan Instansi/ Dinas Teknis Terkait dengan Masyarakat <i>/ Kegiatan Pelayanan Perizinan</i>	Terlaksana -nya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Terlaksananya Pelayanan Perizinan/ Prosentase Penerbitan Izin dari Jumlah Permohonan yang masuk	3.000 ijin terbit	4.304 ijin terbit	143,46	254.112.000	248.301.653	97,71
						<i>Kegiatan Pelayanan Perizinan B</i>							
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan tepat waktu	100 %	100%	100	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/	Tertangani-nya Pengaduan Masyarakat						
						Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan	Frekuensi Penanganan Pengaduan Yang Dilaksanakan	12 kali			30.030.000	23.654.900	78,77
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan	78	78,42	100,54	Survey Kepuasan Masyarakat	Frekuensi Survey IKM(jumlah responden) yang dilaksanakan	2 kali dalam 1 tahun (300 responden)	2 kali dalam 1 tahun (300 responden)	100	3.920.000	3.880.000	98,98

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMPTSP .

Tabel A

Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian sasaran : Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja tahun 2017
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	c. Jumlah Investor PMDN & PMA	-	150	330	220%
	d. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah)	-	650.000.000.000	1.128.242.158.583	173,57%

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian sasaran : Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja tahun 2017
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	a. Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	175,2%	80% (12.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	134,59% (20.189 ijin terbit dari 21.929 permohonan)	134,59%

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian sasaran : Tercapainya Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja tahun 2017
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	e. Persentase Pengaduan ditindak lanjutikan tepat waktu	63,33%	80%(48 kali dari 60 kali)	108,33% (65 pengaduan yang masuk dari 2014 sampai dengan 2017 dan seluruhnya sudah ditangani)	108,33%
	f. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	81,27	79	80,25 (rata-rata nilaiIKM semester I & II tahun 2017)	80,25

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian sasaran : Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Legalitas

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja tahun 2017
			Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan	47,14%	75% (53 desa dari 70 desa)	58 desa dari 70 desa (dari 2015 s/d 2017)	82,86%

Tabel B
Tabel 3.1
Perbandingan antara akumulasi capaian dan target RPJMD

No	Indikator Sasaran	Realisasi akumulasi s/d tahun 2017	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investor PMDN & PMA	330	320	103%
2	Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah)	1.128.242.158.583	1.550.000.000.000	72,78%
3	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	134,59% (20.189 ijin terbit dari 21.929 permohonan)	100% (15.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan)	134,59%
4	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	80,25 (rata-rata nilai IKM semester I & II tahun 2017)	80	80,25
5	Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan	58 desa dari 70 desa (dari 2015 s/d 2017)	100%	82,86%

Keterangan :

Penjelasan terhadap capaian target kinerja :

1. Untuk sasaran tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sudah melampaui target tahun 2017 dan target pada akhir tahun RPJMD
2. Untuk sasaran tercapainya kepuasan masyarakat, baik indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan tepat waktu maupun Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, keduanya sudah melampaui target tahun 2017
3. Untuk sasaran terwujudnya pemahaman masyarakat tentang legalitas usaha pada indikator Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan sudah melampaui target tahun 2017, tetapi belum melampaui target akhir tahun RPJMD.